

ABSTRAK

Sarah Fitria Anisusanti, 126103202196, “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pengguna Kendaraan Di Kabupaten Nganjuk”, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Fahmi Arif M.H.

Kata Kunci: tata kelola

Penelitian ini di latar belakang dengan maraknya penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk, khususnya yang menjadi objek penelitian saya di Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Nganjuk, yang pada dasarnya kita ketahui bahwa penggunaan sepeda listrik tersebut digunakan di jalan raya. Dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 hanya mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur yang boleh dilewati dan persyaratan pengguna saja. Belum memuat aturan penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan disamping itu juga belum adanya payung hukum untuk penindakan sepeda listrik di jalan raya hingga saat ini sehingga Satuan Lalu Lintas Kabupaten Nganjuk hanya memberikan teguran saja belum bisa memberi sanksi bagi penggunanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah kewenangan otonomi daerah terkait fasilitas kendaraan di Kabupaten Nganjuk ?, 2. Bagaimana program dan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menindaklanjuti pengguna sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk ditinjau dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Kondensasi Data (*Data Condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing atau verification*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kewenangan otonomi daerah terkait fasilitas kendaraan di Kabupaten Nganjuk memang saat ini penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang menjadi

problem di kabupaten nganjuk belum adanya fasilitas atau infrastruktur penggunaan sepeda listrik berupa jalan khusus atau lajur khusus maupun trotoar bagi sepeda listrik. sehingga pengguna sepeda listrik saat ini digunakan di jalan raya. 2) program dan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menindaklanjuti pengguna sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta Satlantas dan Dishub menjalankan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk, sosialisasi dengan orang tua murid dan juga sosialisasi ke penjual sepeda listrik. Tujuan utama diciptakannya peraturan ini demi untuk kemaslahatan dan menghindari kemudhratan di jalan raya.

ABSTRACT

Sarah Fitria Anisusanti, 126103202196, “Implementation of the Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2020 Concerning Vehicle User Governance in Nganjuk Regency”, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Fahmi Arif M.H.

Keywords: governance

This research is motivated by the widespread use of electric bicycles in Nganjuk Regency, particularly those that are the object of my research at the Nganjuk Regency Transportation Agency and Traffic Unit. We essentially know that these electric bicycles are used on highways. The Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2020 only regulates the technical requirements for vehicles, permitted lanes, and user requirements. It does not yet include regulations for the use of electric bicycles on highways. Furthermore, there is no legal framework for enforcement of electric bicycles on highways to date, so the Nganjuk Regency Traffic Unit only issues warnings and cannot impose sanctions on users.

The formulation of the problem in this study is: 1. How is the authority of regional autonomy regarding vehicle facilities in Nganjuk Regency?, 2. How are the programs and efforts of the Nganjuk Regency Government in following up on electric bicycle users in Nganjuk Regency reviewed by the Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2020?. The research method used is an empirical juridical approach that produces descriptive data, namely in writing or verbally from individuals and behavior. In this study, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. While the data analysis technique uses Data Condensation, data presentation (data display), conclusion drawing or verification (conclusion drawing or verification).

The results of the study show that: 1) the authority of regional autonomy regarding vehicle facilities in Nganjuk Regency is currently the use of electric bicycles on the highway which is a problem in Nganjuk Regency. There are no facilities or infrastructure for using electric bicycles in the form of special roads or special

lanes or sidewalks for electric bicycles. so that electric bicycle users are currently used on the highway. 2) the program and efforts of the Nganjuk Regency Government in following up on electric bicycle users in Nganjuk Regency. Currently, the Nganjuk Regency Government along with the Traffic Police and Transportation Agency are carrying out socialization in schools in Nganjuk Regency, socialization with parents of students and also socialization to electric bicycle sellers. The main purpose of creating this regulation is for the benefit and to avoid harm on the highway.